

KOTA MATARAM – PROFIL KERENTANAN BENCANA ALAM

Profil ini memberikan penjelasan singkat mengenai kerentanan lingkungan Alam, Bangunan, Sosial, dan Ekonomi di Kota Mataram terhadap bahaya bencana alam. Inisiatif Pengurangan Risiko Bencana yang dilakukan oleh pemerintah lokal juga dijelaskan dalam profil ini.

2016



GRC Masjid Mataram - Mataram Islamic Centre



LINGKUNGAN ALAM

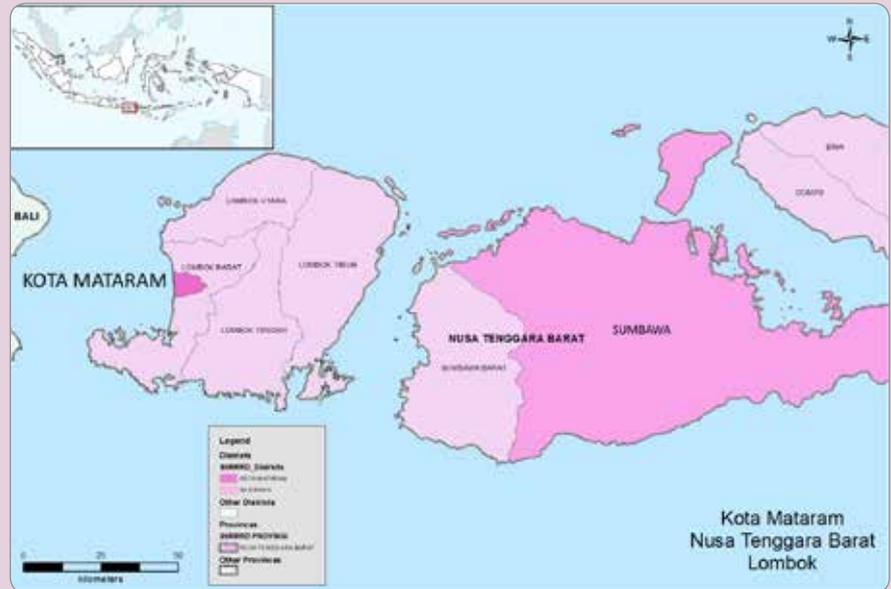
Kota Mataram terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia (Gambar 1). Kota ini bersebelahan dengan Kabupaten Lombok Timur dan Selat Lombok sebagai batas bagian barat. Mataram merupakan ibu kota Kota Mataram sekaligus ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan luas daerah adalah 61,30 km².

Bahaya dan Risiko

Kota Mataram memiliki risiko bencana alam yang besar. Bencana-bencana alam yang pernah terjadi meliputi banjir, cuaca ekstrem, kekeringan, gelombang ekstrem dan erosi, gempa bumi, longsor, gunung meletus, serta konflik sosial. Bencana tsunami besar belum pernah terjadi di Mataram, namun tsunami merupakan ancaman bagi daerah yang sangat dekat dengan pantai ini. Mataram memiliki Angka Indeks Risiko Bencana BNPB sebesar 149 (tinggi) dan menempati urutan ke-302 dari 496 daerah yang berisiko bencana (BNPB 2013).

Kerentanan Lingkungan Alam

Proses geologis aktif terjadi karena adanya pertemuan lempeng tektonik Indo-Australia dan Eurasia di sebelah selatan dan mengakibatkan Mataram rentan terhadap bencana geologi. Palung Sunda, yang membentang sampai selatan Mataram, dapat menyebabkan gempa bumi dahsyat, dan



dapat memicu bencana tsunami. Terlebih lagi, dengan adanya patahan lokal yang aktif di utara Pulau Lombok, akan meningkatkan risiko terjadinya gempa bumi. Kota Mataram yang terletak di Pulau Lombok, yang merupakan pulau yang dibentuk oleh adanya gunung api (Gunung Rinjani), menyebabkan Kota Mataram juga memiliki risiko erupsi gunung berapi.

Secara geologi, Kota Mataram terletak di dataran endapan banjir, sehingga rentan terhadap terjadinya banjir terutama pada musim penghujan. Karena elevasi yang rendah, kota Mataram juga dipengaruhi oleh proses-proses pantai dari pesisir Selat Lombok yang panjang, sehingga sering terjadi abrasi.

Table 1. Penilaian risiko potensi bahaya untuk Kota Mataram (Indeks Risiko Bencana - 2013).

Potensi Bahaya	Gempa	Tsunami	Banjir	Tanah Longsor	Abrasi Pantai	Kebakaran Hutan	Kekeringan
Risiko	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang

LINGKUNGAN SOSIAL

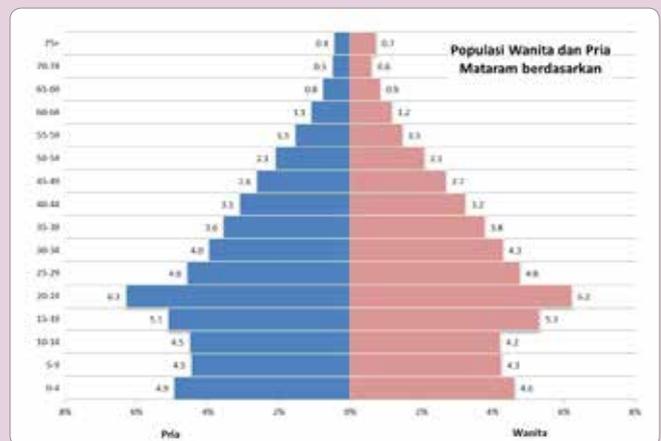
Populasi penduduk Kota Mataram pada tahun 2014 adalah 441.054 orang. Rata-rata kepadatan penduduk pada kabupaten tersebut adalah 7.195 orang per km². Kecamatan Ampenan adalah daerah yang paling padat penduduknya, dengan jumlah 9.096 orang per km². Sekitar 90% penduduknya adalah Muslim; dan sisanya adalah penganut Kristen dan Hindu.

Populasi Penduduk Usia Muda

Mataram memiliki populasi penduduk usia muda karena lebih dari setengah dari total populasi (51,9%) berusia 24 tahun atau kurang. Penduduk usia muda dapat lebih rentan terhadap bencana, tetapi pada usia ini mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan mengenai bahaya dan risiko melalui sekolah. Selain itu, media sosial adalah model pendidikan yang bagus untuk anak-anak dan pemuda.

Populasi Perkotaan

Populasi penduduk perkotaan sangat tergantung pada infrastruktur, perputaran jasa, dan ketersediaan pangan. Ketergantungan ini memiliki arti bahwa masyarakat Mataram sangat rentan selama adanya bencana karena penyaluran barang dan jasa akan terganggu dan kompetisi sumber daya langka akan meningkat.



Sumber : Kota Mataram Dalam Angka, 2013.

LINGKUNGAN EKONOMI

Ketergantungan terhadap Impor

Sebagai pusat kota yang terus bertambah besar, Kota Mataram menjadi lebih tergantung pada barang-barang dan jasa dari luar daerah. Ketergantungan ini menjadikan pemasokan sumber daya menjadi lebih menantang selama terjadinya bencana, sehingga meningkatkan kompetisi dan konflik sosial.

Perubahan Fungsi Lahan

Seperti juga di kota-kota lain di Indonesia, konversi area pertanian produktif menjadi area perumahan dan perindustrian mengurangi potensi produksi hasil pertanian. Akan tetapi, meskipun konversi lahan secara umum mengurangi produksi hasil pertanian, keterbatasan kapasitas lahan yang tersisa justru menjadi penggerak inovasi dan pengembangan teknologi guna meningkatkan produktivitas hasil pertanian di Mataram.

LINGKUNGAN BANGUNAN

Kelongsoran Pengendalian dan Perencanaan Penggunaan Lahan

Di Kota Mataram, hingga saat belum ada perencanaan penggunaan lahan yang mengidentifikasi dan melarang atau mengurangi perkembangan dan pembangunan infrastruktur atau pengembangan bangunan di daerah berpotensi bencana alam. Sebagai akibatnya, banyak bangunan rentan terhadap bencana, terutama bencanabanjir. Pembangunan pada lokasi baru untuk pengembangan juga tidak mempertimbangkan risiko bencana alam atau kondisi lahan. Hanya ada sedikit informasi atau data mengenai lokasi bangunan yang spesifik dan kedekatan bangunan tersebut dengan daerah bencana alam, contohnya bangunan yang berada pada dataran banjir.

Kualitas Konstruksi Bangunan yang Buruk

Banyak bangunan di Kota Mataram tidak memenuhi spesifikasi desain atau dibangun menggunakan bahan-bahan yang buruk. Akibatnya, kualitas struktur bangunan menjadi tidak kuat dan bangunan-bangunan tersebut akan rentan runtuh jika terjadi bencana alam seperti gempa bumi atau bencana alam yang lain.

KAPASITAS PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Anggaran untuk Pengurangan Risiko Bencana (PRB) pada tahun 2016 adalah 4,6 Milyar Rupiah (350.000 Dollar Amerika). Jumlah ini terus meningkat dari tahun 2011. Hal ini ditengarai karena adanya dukungan politis yang baik untuk program PRB di Kota Mataram.

Koordinasi

Meskipun sudah ada struktur untuk memfasilitasi kegiatan PRB melalui regulasi dan pembentukan BPBD; pendidikan, pelatihan, dan kolaborasi, kegiatan PRB di Kota Mataram masih memerlukan perbaikan. Dalam diskusi telah teridentifikasi bahwa partisipasi masyarakat dan pengetahuan tentang kegiatan PRB masih kurang, sehingga masyarakat menjadi lebih bergantung pada pemerintah. Forum PRB diharapkan akan membantu koordinasi dan jaringan antarpemangku kepentingan.

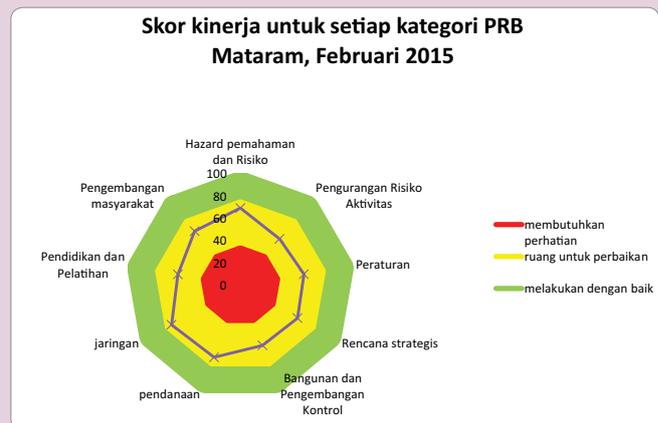
Tanggung Jawab PRB

Instansi pemerintah selain BPBD, sektor swasta, dan masyarakat di Kota Mataram belum memahami dengan baik bahwa mereka memiliki tanggung jawab bersama untuk melaksanakan langkah-langkah pengurangan risiko bencana. Oleh karenanya, kegiatan PRB belum terkoordinasi dengan baik atau tidak terintegrasi di seluruh kelompok dan lembaga ini. Para pemangku kepentingan biasanya memiliki pandangan bahwa manajemen risiko bencana adalah tanggung jawab pemerintah, terutama BPBD.

Pengetahuan yang lebih Baik tentang Potensi Risiko dan Akibatnya

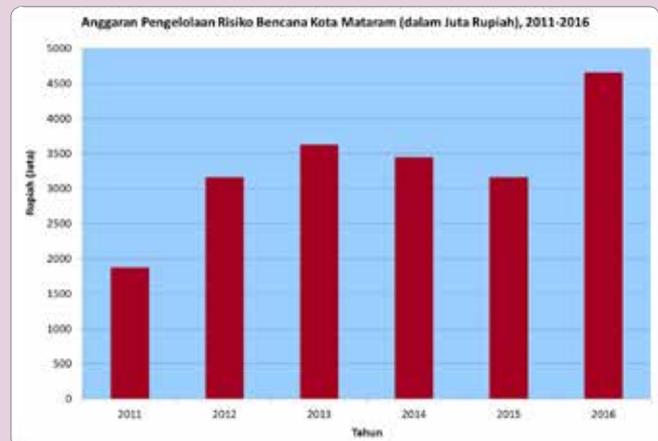
Walaupun peta potensi risiko bencana telah dikembangkan di Kota Mataram, namun belum ada pemahaman terhadap bencana yang berasal dari luar kota. Salah satu contohnya adalah potensi hujan abu dari erupsi besar gunung berapi di dekat Mataram, seperti Gunung Rinjani atau Gunung Agung. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai profil bencana di Mataram akan memungkinkan pihak terkait dan masyarakat untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik lagi di masa depan.

Skor kinerja untuk setiap kategori PRB Mataram, Februari 2015



Sumber : Diagram Hasil Survey Penilaian Diri Pemerintah Daerah untuk Pengurangan Risiko Bencana Diri Pemerintah Daerah (LG-SAT) yang memberikan gambaran ringkas mengenai kelebihan dan kelemahan kondisi PRB di Kota Mataram, Februari 2015.

Anggaran Pengelolaan Risiko Bencana Kota Mataram (dalam Juta Rupiah), 2011-2016



Sumber: BPBD Mataram, 2016.

TENTANG StIRRRD

PENGUATAN KETAHANAN INDONESIA MELALUI PENGURANGAN RISIKO BENCANA



Kegiatan ini kerjasama antara Universitas Gadjah Mada dan GNS Science didukung oleh Program Bantuan New Zealand, untuk membantu pemerintah Indonesia untuk mengurangi dampak dari bencana alam melalui peningkatan kapasitas pengurangan risiko bencana oleh pemerintah lokal dan universitas lokal. Program ini meliputi sepuluh kabupaten/kota dan melibatkan universitas local untuk memahami isu tentang pengurangan risiko bencana di daerahnya, membantu kemampuannya dalam memahami dan mengelola isu tersebut, kemudian menyusun rencana aksi pengurangan risiko bencana dan implementasinya dilapangan.

Salah satu kunci utama disini adalah meningkatkan kerjasama antara insititusi (SKPD) di pemerintah daerah, universitas lokal dan pihak swasta dimana akan membangun pendidikan dan program penelitian dalam aspek pengelolaan bencana untuk membantu masyarakat didaerahnya. Pemerintah daerah terlibat secara aktif baik dalam perencanaan maupun implementasinya dan saling mendukung serta berbagi pengalaman dari seluruh daerah yang termasuk dalam program ini. Kegiatan ini didukung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Desa, BAPENAS dan Kementerian Dalam Negeri.

Sumber:

BNPB, 2013. *Indeks Rawan Bencana Indonesia*.

BPS, 2015. *Kota Mataram Dalam Angka 2015*.

BPBD Kota Mataram, 2015. *Rencana Penanggulangan Bencana Kota Mataram*.

Catatan dari *Workshop Kunjungan Awal StIRRRD (24 November 2014)*.

Catatan dari *Workshop Penyusunan Rencana Aksi StIRRRD (26 Februari 2015)*.

Catatan dari *Kelompok Diskusi Perempuan Terfokus StIRRRD (28 Februari 2015)*.

Catatan dari *Workshop Finalisasi Rencana Aksi StIRRRD (23 Februari 2016)*.

INFORMASI LEBIH LANJUT:

<http://StIRRRD.org> atau

HUBUNGI:



Michele Daly

Risk and Society Department
GNS Science
Wellington, New Zealand
m.daly@gns.cri.nz



Dr. Teuku Faisal Fathani

Department of Civil and
Environmental Engineering
Gadjah Mada University
Yogyakarta, Indonesia
tfathani@ugm.ac.id



Nico Fournier

Head of Volcanology
GNS Science
Wellington, New Zealand
n.fournier@gns.cri.nz



Esti Anantasari

Gadjah Mada University
Yogyakarta, Indonesia
esti.anantasari@ugm.ac.id

